PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/
Volume 6, Nomor 2, Oktober 2026
E-ISSN: 2807-9337

Potret *Civic Knowledge* Peserta Didik pada Era Transformasi Digital: Tantangan bagi Pembelajaran PPKn Abad ke-21

Masluddin[1*], Sunarni Yassa[2], Megawati[3]
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Cokroaminoto Palopo, Indonesia[1,2,3]
*masluddin@uncp.ac.id[1], sunarni@uncp.ac.id[2], megawati@uncp.ac.id[3]

Abstract

Digital transformation has brought significant changes to people's lives, including the development of students' civic knowledge. The advancement of information technology, digital media, and Artificial Intelligence requires students to possess relevant civic knowledge to participate critically, ethically, and responsibly in the digital space. This study aims to analyze the level of students' civic knowledge in the era of digital transformation as a challenge for 21st-century Pancasila and Civic Education learning. This study employed a quantitative approach using a descriptive survey method. The respondents consisted of 150 students from SMA Negeri 1 Palopo, SMA Negeri 3 Palopo, and SMK Negeri 1 Palopo, selected through purposive sampling. The results indicate that students' civic knowledge was at a high level, with the majority of respondents (54.7%) classified in the high category and 18.7% in the very high category. The highest indicator was citizens' rights and obligations in the digital space, at 80.2%, while the lowest was the responsible use of Artificial Intelligence, at 56.4%. The findings suggest that students are prepared to engage in digital citizenship but still require a stronger understanding of emerging technologies. This study concludes that Pancasila and Civic Education learning should be developed adaptively to strengthen students' civic competencies in the era of digital transformation.

Keywords: Artificial Intelligence; Civic Knowledge; Digital Citizenship; Pancasila and Civic Education; Digital Transformation

Abstrak

Transformasi digital telah menghadirkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam pembentukan pengetahuan kewarganegaraan peserta didik. Perkembangan teknologi informasi, media digital, dan *Artificial Intelligence* menuntut peserta didik memiliki *civic knowledge* yang relevan agar mampu berpartisipasi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat *civic knowledge* peserta didik pada era transformasi digital sebagai tantangan bagi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan abad ke-21. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif survei. Responden penelitian berjumlah 150 peserta didik dari SMA Negeri 1 Palopo, SMA Negeri 3 Palopo, dan SMK Negeri 1 Palopo yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan tingkat *civic knowledge* peserta didik berada pada kategori tinggi dengan mayoritas responden sebesar 54,7% berada pada kategori tinggi dan 18,7% kategori sangat tinggi. Indikator tertinggi adalah hak dan kewajiban warga negara di ruang digital sebesar 80,2%, sedangkan indikator terendah adalah pemanfaatan *Artificial Intelligence* secara bertanggung jawab sebesar 56,4%. Pembahasan menunjukkan peserta didik memiliki kesiapan dalam menghadapi kewarganegaraan digital, tetapi masih membutuhkan penguatan pemahaman terhadap teknologi baru. Penelitian ini menyimpulkan pembelajaran PPKn perlu dikembangkan secara adaptif untuk memperkuat kompetensi kewarganegaraan peserta didik pada era transformasi digital.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Civic Knowledge*, Kewarganegaraan Digital, Pembelajaran PPKn, Transformasi Digital

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk cara individu memperoleh informasi, berinteraksi, dan menjalankan perannya sebagai warga negara. Perkembangan teknologi menciptakan ruang sosial baru yang menuntut kemampuan memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab digital sehingga pendidikan kewarganegaraan perlu beradaptasi terhadap perubahan sosial akibat teknologi (Schmitt dkk., 2024). Generasi muda sebagai pengguna aktif teknologi berada pada posisi strategis sekaligus rentan membutuhkan pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan karakteristik generasi digital (Hermawan dkk., 2024). Penguatan *civic knowledge* menjadi penting untuk membentuk peserta didik yang mampu berpikir kritis dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam masyarakat digital (Elsyifa dkk., 2025). Perkembangan ekosistem digital semakin memperkuat kebutuhan tersebut karena jumlah pengguna internet global mencapai 5,35 miliar orang dan pengguna media sosial mencapai 5,04 miliar orang (Kemp, 2024). Di Indonesia, pengguna internet mencapai 221,56 juta jiwa dari total populasi 278,69 juta jiwa berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024). Kondisi ini menunjukkan peserta didik hidup dalam lingkungan yang sangat terhubung dengan teknologi sehingga membutuhkan pemahaman kewarganegaraan yang mencakup perilaku, etika, dan tanggung jawab digital.

Era transformasi digital memperluas konsep kewarganegaraan menuju konsep *digital citizenship* yang menuntut peserta didik memahami keamanan informasi, etika komunikasi digital, dan tanggung jawab penggunaan teknologi melalui integrasi literasi digital dalam pendidikan kewarganegaraan (Supriyanto, 2026). Ruang digital memberi peluang bagi peserta didik untuk mengakses informasi, mengembangkan kreativitas, dan berpartisipasi dalam isu publik melalui penguatan digital *citizenship* (Rumiati dkk., 2023). Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan seperti hoaks, rendahnya literasi informasi, pelanggaran etika digital, dan penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab sehingga kecakapan literasi digital *citizenship* menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda (Hariyadi, 2022). Penguasaan *civic knowledge* diperlukan agar peserta didik mampu beradaptasi dengan perubahan zaman melalui kemampuan memahami informasi dan berinteraksi secara kritis di ruang digital (Pertiwi dkk., 2025). Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) semakin memperkuat kebutuhan tersebut karena AI memberikan peluang dalam pembelajaran sekaligus menghadirkan

tantangan terkait validitas informasi, privasi data, dan etika penggunaan teknologi. Penggunaan media digital mendukung penguatan *civic literacy* peserta didik (Mohamed & Hermansyah, 2024), sementara pengembangan *civic tech skills* diperlukan agar peserta didik mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam ruang digital (Nasoha dkk., 2025). Penguatan keterampilan kewarganegaraan berbasis teknologi menjadi bagian penting dalam menghadapi transformasi digital (Pratiwi dkk., 2025).

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membangun *civic knowledge* peserta didik karena perkembangan digital menghadirkan bentuk interaksi kewarganegaraan baru yang membutuhkan penguatan *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* (Sumiatun dkk., 2026). PPKn tidak hanya diarahkan pada pemahaman negara, hukum, dan demokrasi, tetapi juga perlu membekali peserta didik agar mampu menggunakan teknologi secara produktif, memahami etika digital, dan berpartisipasi dalam masyarakat berbasis informasi. Pendidikan kewarganegaraan abad ke-21 perlu menyesuaikan karakteristik generasi digital karena berperan membentuk warga negara aktif, kritis, dan bertanggung jawab (Syamzaimar, 2026). Pemetaan kondisi *civic knowledge* peserta didik menjadi penting untuk mengetahui kesiapannya menghadapi tantangan kewarganegaraan digital.

Penelitian sebelumnya membahas hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan perkembangan teknologi digital. Maharani dkk. (2024) menunjukkan bahwa penerapan *Project Based Learning* mampu meningkatkan *civic knowledge* peserta didik melalui pengalaman belajar yang aktif dan kontekstual. Ismail dkk. (2025) menemukan bahwa Pendidikan Pancasila berkontribusi dalam membangun *civic literacy* melalui penguatan nilai kewarganegaraan, kemampuan berpikir kritis, dan kesiapan menghadapi informasi digital. Megasari (2025) juga menunjukkan integrasi literasi digital dalam pembelajaran PKn mampu menanamkan nilai etika digital agar peserta didik menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Sartika dan Megasari (2025) menjelaskan model digital-interaktif mampu memperkuat *civic responsibility*, Rahayu dkk. (2025) menemukan bahwa literasi digital berbasis saintifik dapat meningkatkan *civic disposition*, serta Mazid dkk. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan *deep learning* meningkatkan kualitas pembelajaran PKn melalui pemahaman mendalam dan adaptasi terhadap teknologi.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pendidikan kewarganegaraan dalam konteks digital, sebagian besar kajian masih berfokus pada strategi pembelajaran,

pengembangan literasi digital, model pembelajaran inovatif, serta penguatan sikap kewarganegaraan. Kajian mengenai gambaran empiris tingkat *civic knowledge* peserta didik berdasarkan indikator kewarganegaraan digital masih perlu dikembangkan, terutama terkait isu etika digital, demokrasi digital, literasi informasi, dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* secara bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat *civic knowledge* peserta didik pada era transformasi digital sebagai gambaran kesiapan generasi muda menghadapi tantangan kewarganegaraan abad ke-21. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan pembelajaran PPKn yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu membentuk peserta didik yang kritis, etis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara digital.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. *Civic Knowledge* dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Civic knowledge merupakan salah satu komponen utama dalam kompetensi kewarganegaraan yang berkaitan dengan pemahaman individu mengenai konsep, prinsip, nilai, dan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. *Civic knowledge* menjadi dasar bagi peserta didik untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, prinsip demokrasi, aturan sosial, serta tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Penguatan *civic knowledge* dalam pembelajaran kewarganegaraan menjadi semakin penting karena perkembangan era digital menuntut peserta didik memiliki kemampuan memahami nilai kewarganegaraan dalam berbagai konteks kehidupan (Maharani dkk., 2024). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki kontribusi dalam membangun *civic literacy* peserta didik agar mampu memahami perannya sebagai warga negara yang kritis dan bertanggung jawab (Ismail dkk., 2025).

Perkembangan masyarakat yang modern menyebabkan konsep *civic knowledge* mengalami perluasan makna karena kewarganegaraan tidak lagi terbatas pada aktivitas sosial secara langsung, tetapi juga mencakup aktivitas warga negara dalam ruang digital. Peserta didik sebagai bagian dari generasi digital membutuhkan pemahaman mengenai bagaimana menjalankan peran sebagai warga negara dalam lingkungan yang semakin terhubung dengan teknologi. Integrasi literasi digital dalam pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu upaya dalam memperkuat pemahaman peserta didik mengenai etika, tanggung jawab, dan perilaku dalam ruang digital (Megasari, 2025). Pengembangan digital *citizenship* melalui pembelajaran PKn juga diperlukan agar peserta didik mampu

beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tetap menerapkan nilai kewarganegaraan dalam kehidupan digital (Sartika & Megasari, 2025).

Dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), *civic knowledge* menjadi aspek yang mendukung pembentukan kompetensi kewarganegaraan secara menyeluruh. Penguasaan pengetahuan kewarganegaraan memungkinkan peserta didik memahami nilai Pancasila, prinsip demokrasi, norma sosial, dan etika kehidupan bersama. Pengembangan *civic knowledge* perlu berjalan bersama dengan peningkatan *civic disposition* agar peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memiliki sikap kewarganegaraan yang sesuai dengan kebutuhan abad ke-21 (Rahayu dkk., 2025). Pembelajaran PPKn berbasis pemahaman mendalam juga diperlukan agar peserta didik mampu menghubungkan konsep kewarganegaraan dengan persoalan nyata yang muncul akibat perkembangan teknologi digital (Mazid dkk., 2025).

B. Transformasi Digital dan Konsep Digital *Citizenship*

Transformasi digital merupakan proses perubahan sosial yang terjadi akibat integrasi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan ini memengaruhi cara masyarakat berkomunikasi, memperoleh informasi, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Pendidikan kewarganegaraan pada era Society 5.0 perlu mengalami transformasi agar mampu membentuk peserta didik yang humanis sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi digital (Fajriyah dkk., 2025). Perubahan pendekatan pendidikan kewarganegaraan juga diperlukan karena transformasi sosial akibat teknologi menuntut pembelajaran yang mengembangkan kesadaran kritis peserta didik (Chanda, 2024).

Digital *citizenship* mengacu pada kemampuan individu untuk menggunakan teknologi digital secara aman, kritis, etis, dan bertanggung jawab. Konsep ini mencakup berbagai aspek seperti literasi digital, etika komunikasi, keamanan data, partisipasi digital, serta kemampuan mengevaluasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Pendidikan kewarganegaraan perlu diarahkan sebagai transformatif yang membekali peserta didik dengan kemampuan menghadapi perubahan sosial dan perkembangan masyarakat digital (Hoggan-Kloubert & Mabrey, 2022). Keberhasilan penguatan kewarganegaraan digital membutuhkan dukungan guru PPKn yang mengintegrasikan literasi digital dalam proses pembelajaran (Sihotang dkk., 2024).

Perkembangan teknologi baru seperti *Artificial Intelligence* semakin memperluas tantangan dalam praktik kewarganegaraan digital. AI memberikan berbagai kemudahan dalam memperoleh informasi dan mendukung apembelajaran, tetapi juga menghadirkan persoalan mengenai akurasi informasi, etika penggunaan, dan tanggung jawab pengguna. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran kewarganegaraan perlu dilakukan melalui integrasi kemampuan pedagogik dan teknologi agar pembelajaran tetap berorientasi pada nilai kewarganegaraan (Pitriani dkk., 2025). Transformasi pendidikan kewarganegaraan abad ke-21 membutuhkan metode dan pendekatan baru agar peserta didik menghadapi perubahan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab (Nasution, 2026).

C. Pembelajaran PPKn pada Era Abad ke-21

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik agar mampu menjadi warga negara yang memahami nilai, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial. Pada era abad ke-21, pembelajaran PPKn menghadapi perubahan besar karena perkembangan teknologi telah mengubah pola interaksi sosial dan cara peserta didik memperoleh informasi. Strategi pembelajaran kewarganegaraan yang inovatif diperlukan untuk membangun kompetensi peserta didik agar mampu beradaptasi dengan tantangan kehidupan modern (Ramadhan & Sauri, 2026). Praktik pedagogik partisipatif dalam pembelajaran kewarganegaraan mampu memperkuat keterlibatan peserta didik sebagai bagian pembentukan kompetensi kewarganegaraan (Rahmelia dkk., 2026).

Perubahan karakteristik peserta didik pada era digital menuntut pembelajaran PPKn yang lebih inovatif, interaktif, dan berbasis pengalaman. Pembelajaran yang hanya berpusat pada penyampaian materi cenderung kurang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan partisipasi peserta didik. Inovasi pembelajaran berbasis konteks dapat menjadi pendekatan untuk memperkuat *civic competence* karena memberikan pengalaman belajar yang lebih dekat dengan kehidupan peserta didik (Misgiyati dkk., 2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKN juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter warga negara yang mampu menghadapi perkembangan zaman (Iba & Iba, 2026).

Pembelajaran PPKn abad ke-21 perlu diarahkan pada pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang mencakup *civic knowledge, civic skills*, dan *civic disposition.*

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk peserta didik yang mampu memahami konsep kewarganegaraan, menerapkan keterampilan sosial, dan memiliki karakter sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berperan membentuk pemahaman mengenai kehidupan bernegara, tetapi juga dapat menjadi sarana pengembangan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial peserta didik (Khayra & Syamzaimar, 2026). Penguatan kompetensi kewarganegaraan melalui pembelajaran PPKn yang adaptif terhadap teknologi menjadi langkah penting dalam membangun generasi yang siap menghadapi perubahan masyarakat digital (Maharani dkk., 2024).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif survei yang bertujuan untuk menggambarkan tingkat *civic knowledge* peserta didik pada era transformasi digital berdasarkan data numerik yang diperoleh melalui instrumen penelitian. Penelitian dilaksanakan pada tiga sekolah menengah di Kota Palopo, yaitu SMA Negeri 1 Palopo, SMA Negeri 3 Palopo, dan SMK Negeri 1 Palopo dengan jumlah responden sebanyak 150 peserta didik yang terdiri atas 50 peserta didik dari setiap sekolah. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* mempertimbangkan keterwakilan peserta didik yang aktif mengikuti pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pengumpulan data dilakukan menggunakan tes *civic knowledge* berbentuk pilihan ganda sebanyak 25 butir soal yang dikembangkan berdasarkan lima indikator, yaitu hak dan kewajiban warga negara di ruang digital, literasi informasi dan hoaks, demokrasi digital, etika digital, serta pemanfaatan *Artificial Intelligence* secara bertanggung jawab. Data yang dianalisis menggunakan statistik secara deskriptif berupa persentase dan rata-rata *(mean)* untuk mengetahui distribusi serta capaian tingkat *civic knowledge* peserta didik. Rumus persentase yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$P = \frac{f}{N} \times 100$$

Analisis persentase digunakan untuk mengetahui proporsi capaian tingkat *civic knowledge* peserta didik berdasarkan kategori tertentu. Keterangan rumus tersebut yaitu P merupakan nilai persentase, f merupakan frekuensi atau jumlah responden pada kategori tertentu, dan N merupakan jumlah keseluruhan responden penelitian. Selain

analisis persentase, penelitian ini menggunakan nilai rata-rata (*mean*) untuk memperoleh gambaran capaian keseluruhan maupun capaian berdasarkan masing-masing indikator penelitian. Perhitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh skor yang diperoleh peserta didik kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan responden. Rumus *mean* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

Hasil perhitungan statistik deskriptif kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tingkat *civic knowledge* peserta didik untuk mempermudah proses interpretasi data. Kategori hasil analisis terdiri atas sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah berdasarkan capaian skor peserta didik. Data yang telah dikategorikan selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, persentase, dan rata-rata untuk menunjukkan kondisi *civic knowledge* peserta didik pada era transformasi digital. Interpretasi hasil dilakukan dengan membandingkan capaian setiap indikator sehingga dapat menggambarkan aspek pemahaman kewarganegaraan digital yang telah berkembang dengan baik maupun aspek yang masih membutuhkan penguatan dalam pembelajaran PPKn abad ke-21.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyajikan gambaran tingkat *civic knowledge* peserta didik pada era transformasi digital berdasarkan hasil tes yang diberikan kepada 150 peserta didik dari tiga sekolah menengah di Kota Palopo.

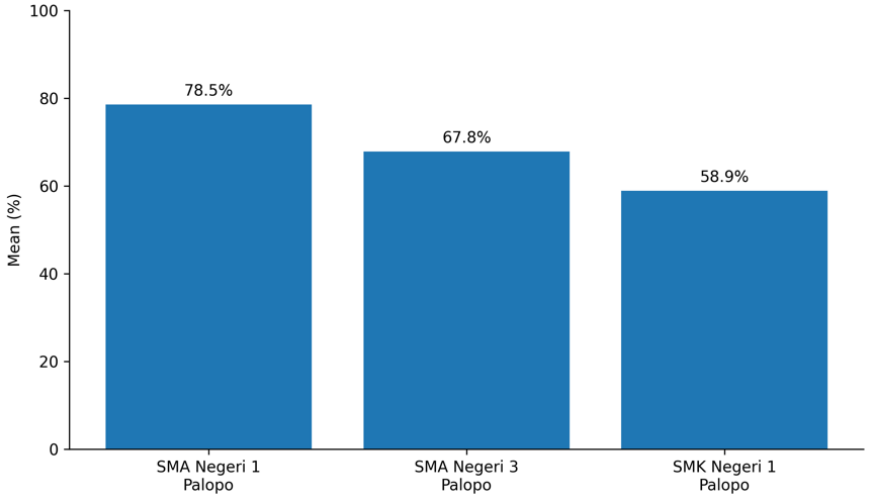
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Sekolah

Sekolah	Frekuensi	Persentase
SMA Negeri 1 Palopo	50	33,3%
SMA Negeri 3 Palopo	50	33,3%
SMK Negeri 1 Palopo	50	33,3%
Total	150	100%

Berdasarkan Tabel 1, jumlah responden dalam penelitian ini terdiri atas 150 peserta didik yang berasal dari tiga sekolah berbeda di Kota Palopo. Setiap sekolah memiliki jumlah responden yang sama, yaitu 50 peserta didik atau sebesar 33,3% dari keseluruhan sampel penelitian. Komposisi responden yang seimbang memberikan gambaran yang proporsional mengenai kondisi *civic knowledge* peserta didik dari masing-masing sekolah. Distribusi ini juga memungkinkan hasil penelitian menggambarkan variasi

pemahaman kewarganegaraan digital peserta didik berdasarkan karakteristik lingkungan sekolah yang berbeda.

Gambar 1. Grafik Perbandingan Rata-rata *Civic Knowledge* Berdasarkan Sekolah



Berdasarkan Gambar 1, terdapat perbedaan capaian rata-rata *civic knowledge* peserta didik pada masing-masing sekolah. SMA Negeri 1 Palopo memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 78,5% dan termasuk dalam kategori tinggi. SMA Negeri 3 Palopo memperoleh rata-rata sebesar 67,8% yang juga berada pada kategori tinggi, sedangkan SMK Negeri 1 Palopo memperoleh nilai rata-rata sebesar 58,9% dengan kategori sedang. Hasil tersebut menunjukkan secara umum peserta didik telah memiliki pemahaman kewarganegaraan digital yang cukup baik, meskipun masih terdapat perbedaan tingkat penguasaan antar sekolah.

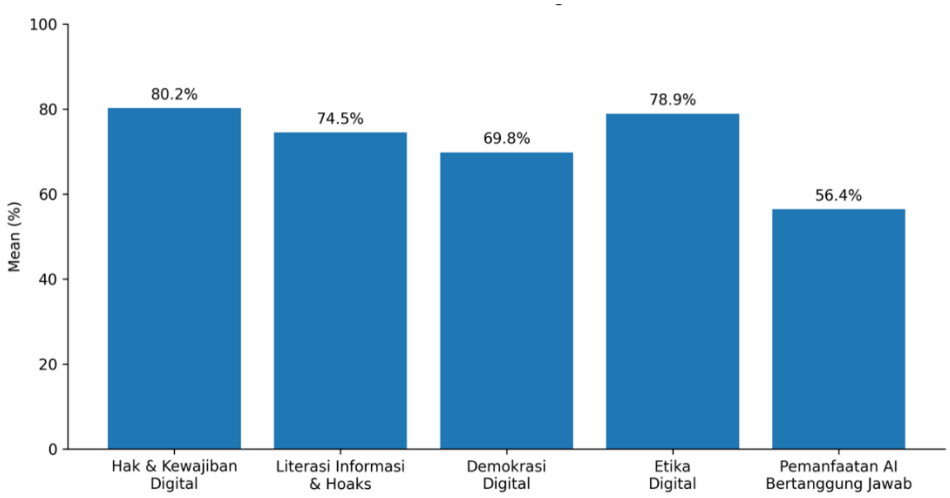
Tabel 2. Kategori *Civic Knowledge* Peserta Didik

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sangat Tinggi	28	18,7%
Tinggi	82	54,7%
Sedang	40	26,6%
Rendah	0	0%
Sangat Rendah	0	0%
Total	150	100%

Berdasarkan Tabel 2, mayoritas peserta didik memiliki tingkat *civic knowledge* pada kategori tinggi dengan jumlah 82 peserta didik atau sebesar 54,7% dari keseluruhan responden. Sebanyak 28 peserta didik atau 18,7% berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan 40 peserta didik atau 26,6% berada pada kategori sedang. Tidak terdapat peserta didik yang termasuk dalam kategori rendah maupun sangat rendah. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep kewarganegaraan digital, tetapi masih terdapat kelompok peserta didik yang membutuhkan penguatan agar mampu mencapai kategori lebih optimal.

Gambar 2. Grafik Perbandingan *Civic Knowledge* Berdasarkan Indikator



Berdasarkan Gambar 2, indikator hak dan kewajiban warga negara di ruang digital memperoleh capaian tertinggi dengan rata-rata sebesar 80,2% dan termasuk dalam kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa peserta didik telah memiliki pemahaman yang baik mengenai tanggung jawab, aturan, serta perilaku sebagai warga negara dalam lingkungan digital. Indikator etika digital juga menunjukkan capaian tinggi sebesar 78,9%, diikuti oleh literasi informasi dan hoaks sebesar 74,5%, serta demokrasi digital sebesar 69,8%. Namun, indikator pemanfaatan *Artificial Intelligence* secara bertanggung jawab memperoleh skor paling rendah sebesar 56,4% dengan kategori sedang.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat *civic knowledge* peserta didik pada era transformasi digital secara umum berada pada kategori tinggi. Temuan menggambarkan bahwa peserta didik memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep kewarganegaraan digital, termasuk hak dan kewajiban di ruang digital, literasi informasi, demokrasi digital, serta etika penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi telah memperluas ruang implementasi nilai kewarganegaraan karena peserta didik tidak hanya berperan dalam kehidupan sosial langsung, tetapi juga dalam komunitas digital yang membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab. Hasil ini sejalan dengan Maharani dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa peningkatan *civic knowledge* dapat terjadi melalui pengalaman belajar kewarganegaraan yang aktif dan kontekstual. Tingginya capaian tersebut juga memperlihatkan pentingnya peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

dalam membangun pemahaman kewarganegaraan digital. Hal ini mendukung temuan Ismail dkk. (2025) pendidikan Pancasila mampu meningkatkan *civic literacy* peserta didik dalam menghadapi perkembangan informasi digital, serta sejalan dengan Hoggan-Kloubert dan Mabrey (2022) menekankan pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan transformatif untuk membangun kesadaran terhadap perubahan sosial.

Berdasarkan capaian indikator, aspek hak dan kewajiban warga negara di ruang digital memperoleh hasil tertinggi yang menunjukkan bahwa peserta didik telah memahami pentingnya menggunakan teknologi secara bertanggung jawab sesuai nilai kewarganegaraan. Pemahaman tersebut mencakup kesadaran terhadap perilaku positif, penghargaan terhadap hak pengguna lain, dan etika interaksi digital. Temuan ini sejalan dengan Megasari (2025) yang menyatakan bahwa integrasi literasi digital dalam pembelajaran PKn mampu memperkuat pemahaman peserta didik mengenai etika dan tanggung jawab digital. Sihotang dkk. (2024) menjelaskan pembelajaran PPKn berbasis literasi digital membutuhkan dukungan guru profesional agar nilai kewarganegaraan dapat diintegrasikan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, capaian etika digital yang tinggi memperlihatkan bahwa peserta didik semakin memahami pentingnya perilaku bijak dalam ruang virtual. Kondisi ini mendukung Sartika & Megasari (2025) yang menemukan bahwa model digital-interaktif mampu memperkuat *civic responsibility* peserta didik, serta Chanda (2024) menegaskan perlunya pendekatan transformatif dalam pendidikan kewarganegaraan agar sesuai perkembangan sosial dan teknologi. Masluddin dkk. (2026) menjelaskan pemanfaatan teknologi *Augmented Reality* dalam pembelajaran PPKn dapat mendukung pemahaman konsep, keterlibatan peserta didik, serta penguatan nilai-nilai kewarganegaraan.

Indikator literasi informasi dan hoaks ini menunjukkan capaian tinggi yang menggambarkan kemampuan peserta didik dalam memahami pentingnya validasi informasi digital. Kemampuan memilah informasi menjadi bagian penting dari *civic knowledge* karena kualitas partisipasi warga negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan menghadapi arus informasi. Hasil ini mendukung Rahayu dkk. (2025) yang menjelaskan bahwa literasi digital dalam pembelajaran PKn berbasis saintifik mampu memperkuat *civic disposition* melalui sikap kritis dan tanggung jawab terhadap informasi. Nasution (2026) juga menyatakan bahwa transformasi pendidikan kewarganegaraan abad ke-21 membutuhkan perubahan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan

teknologi. Indikator demokrasi digital juga berada pada kategori tinggi meskipun masih membutuhkan penguatan dalam praktik partisipasi digital yang kritis. Temuan ini sejalan dengan Mazid dkk. (2025) pembelajaran PKn era digital membutuhkan pendekatan *deep learning* agar peserta didik mampu menerapkan nilai kewarganegaraan dalam kehidupan nyata, serta Ramadhan dan Sauri (2026) menunjukkan strategi pembelajaran inovatif mampu meningkatkan *civic disposition* melalui keterlibatan aktif peserta didik.

Meskipun sebagian besar indikator berada pada kategori tinggi, pemanfaatan *Artificial Intelligence* secara bertanggung jawab memperoleh skor paling rendah. Peserta didik perlu dalam memperoleh penguatan mengenai etika penggunaan AI, validitas informasi, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Kondisi ini sesuai Fajriyah dkk. (2025) yang menyatakan transformasi peran pendidik PPKn pada era *Society* 5.0 diperlukan agar pembelajaran mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Pitriani dkk. (2025) juga menjelaskan bahwa integrasi teknologi melalui pendekatan TPACK dapat membantu guru mengembangkan pembelajaran PPKn yang lebih efektif. Selain itu, adanya perbedaan capaian *civic knowledge* antar sekolah menunjukkan bahwa kesiapan peserta didik dapat dipengaruhi oleh lingkungan belajar, akses teknologi, dan strategi pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh Rahmelia dkk. (2026) menyatakan pedagogik partisipatif dapat memperkuat *civic disposition*, serta Misgiyati dkk. (2025) menjelaskan inovasi pembelajaran berbasis konteks mampu memperkuat *civic competence*. Yuniarto dkk. (2025) menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana pembentukan kesadaran konstitusi dan partisipasi sipil mahasiswa, meskipun tetap menghadapi tantangan berupa disinformasi dan kebebasan berekspresi.

Civic knowledge peserta didik berkembang dengan baik, tetapi tetap membutuhkan penguatan agar mampu menghadapi dinamika kewarganegaraan digital yang terus berubah. Pendidikan kewarganegaraan perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman konsep, tetapi juga pada penerapan nilai kewarganegaraan dalam kehidupan nyata dan ruang digital. Iba dan Iba (2026) menjelaskan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran PKN berperan membentuk karakter warga negara sesuai perkembangan zaman, sedangkan Khayra dan Syamzaimar (2026) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana pengembangan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial peserta didik.

V. KESIMPULAN

Tingkat *civic knowledge* peserta didik pada era transformasi digital secara umum berada pada kategori tinggi, terutama pada aspek hak dan kewajiban warga negara di ruang digital, etika digital, literasi informasi dan hoaks, serta demokrasi digital. Namun, pemanfaatan *Artificial Intelligence* secara bertanggung jawab masih berada pada kategori sedang sehingga menjadi tantangan dalam penguatan kompetensi kewarganegaraan abad ke-21. Temuan ini mengimplikasikan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) perlu dikembangkan secara adaptif dengan mengintegrasikan literasi teknologi, etika penggunaan AI, keamanan informasi, dan tanggung jawab digital agar mampu membentuk peserta didik yang kritis dan bertanggung jawab sebagai warga negara digital. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan responden yang masih terbatas serta penggunaan pendekatan kuantitatif deskriptif yang belum menggali faktor-faktor yang memengaruhi *civic knowledge* secara mendalam. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan responden, menggunakan pendekatan campuran, serta mengembangkan kajian pada aspek *civic skills* dan *civic disposition*.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Survei penetrasi internet Indonesia 2024*. https://apjii.or.id

Chanda, T. C. (2024). Transformative approaches to teaching and learning civic education: A case of selected secondary schools in Lusaka District, Zambia. *International Journal of Research*. https://doi.org/10.5281/zenodo.12684375

Elsyifa, R. R., Suherman, A., Jamilah, J., Hermansyah, H., Maulana, A., Nurfaizan, H., & Supriyadi, S. (2025). The strategic role of civic education in preparing the young generation to face digital transformation in the business world. In *9th Global Conference on Business, Management and Entrepreneurship (GCBME 2024)* (pp. 4–11). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-817-2_2

Fajriyah, A. R., Ardinary, C., Kasta, M. A., Alwan, M. H., & Nurahma, R. S. (2025). Transformasi peran pendidik PPKn di era Society 5.0 menuju pendidikan humanis dan digital. *Tumoutou Social Science Journal, 2*(2), 124–128. https://doi.org/10.61476/24twya10

Hariyadi, S. (2022). Membangun kecakapan literasi digital citizenship melalui model Information Communication Technology (ICT) Learning. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 7*(2), 7–14. https://doi.org/10.24269/jpk.v7i2.5774

Hermawan, D., Darmawan, C., & Bestari, P. (2024). Transforming citizenship education in the digital era: Challenges and opportunities for the Indonesian millennial

generation. *Unnes Political Science Journal, 8*(1), 39–43. https://doi.org/10.15294/upsj.v8i1.9256

Hoggan-Kloubert, T., & Mabrey, P. E. (2022). Civic education as transformative education. *Journal of Transformative Education, 20*(3), 167–175. https://doi.org/10.1177/15413446221103173

Iba, L., & Iba, S. (2026). Analysis of the implementation of Pancasila values through civics education (PKN) learning in junior high schools: A literature review. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP), 7*(3), 1709–1723. https://doi.org/10.55583/jkip.v7i3.2282

Ismail, M., Jumrawati, J., & Edi, M. G. P. (2025). Civic literacy siswa melalui pendidikan Pancasila di era digital. *SILA, 1*(1), 42–50. https://jurnal.unram.ac.id/index.php/sila/article/view/8894

Kemp, S. (2024). *Digital 2024: Global overview report*. DataReportal. https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report

Khayra, S. H. T., & Syamzaimar, S. (2026). Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pengembangan kepemimpinan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu, 3*(3), 130–139. https://doi.org/10.69714/v6y0ev56

Maharani, M., Wuryandani, W., Retnasari, L., & Wibowo, S. E. (2024). The effect of project based learning on the increase students' civic knowledge capabilities in the digital age. *Journal for Lesson and Learning Studies, 7*(3). https://doi.org/10.23887/jlls.v7i3.88752

Masluddin, M., Syamsuddin, I., & Hariati, S. (2026). Transformasi pembelajaran PPKn di era digital melalui teknologi augmented reality. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6*(1), 1–11. https://doi.org/10.36456/p.v6i1.11418

Mazid, S., Istianah, A., Farikah, F., & Mulyani, M. (2025). Meningkatkan kualitas pembelajaran PKN di era digital dengan pendekatan deep learning. *Haumeni Journal of Education, 5*(1), 49–60. https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i1.23073

Megasari, I. I. (2025). Integrasi literasi digital dalam PKn: Menanamkan nilai-nilai etika digital peserta didik. *WASPADA (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan), 13*(1), 12–15. https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/waspada/article/download/713/532

Misgiyati, M., Kale, D. Y. A., Mas'ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Etnomatika dalam pendidikan kewarganegaraan: Inovasi pembelajaran berbasis kearifan lokal untuk penguatan civic competence. *Jurnal Civicatio, 1*(1), 10–18. https://civicatio.my.id/Jurnal/index.php/Jc/article/view/2

Mohamed, S., & Hermansyah, S. (2024). The role of digital media in developing civic literacy among high school students in the era of social transformation. *SMART: Journal of Multidisciplinary Educational, 2*(2), 97–107. https://doi.org/10.61677/smart.v2i2.592

Nasoha, A. M. M., Putri, S. A., & Safitri, M. D. (2025). Pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan civic tech skills untuk partisipasi politik digital. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2*(5), 598–612. https://litera-academica.com/ojs/litera/article/view/204

Nasution, I. H. (2026). Transformasi pendidikan kewarganegaraan di abad 21: Analisis studi literatur tentang metode dan pendekatan. *JUDIKA: Jurnal Pendidikan dan Bahasa, 4*(2), 56–65. https://doi.org/10.59696/judika.v4i2.270

Pertiwi, A., Pramudika, N. R., Isnaini, P., & Fikri, R. A. (2025). Membangun literasi digital peserta didik melalui pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi media sosial. *Indonesian Journal of Law and Justice, 2*(1), 34–41.

Pitriani, H., Handayani, N. F., Hardoko, A., & Majid, N. (2025). Transformasi peran guru PPKn SMP melalui pemanfaatan media Canva: Analisis kerangka TPACK dalam pembelajaran era digital. *Jurnal Penelitian Pendidikan, 25*(2), 272–284. https://doi.org/10.17509/jpp.v25i2.88600

Pratiwi, E. D., Anggraeni, L., Rezika, A., Hasugian, A., & Arthami, M. (2025). Design thinking and digital civilization: Strategies for building civic skills in digital transformation. *The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, 46*, 41–50. https://doi.org/10.55549/epess.961

Rahayu, D. A., Ulum, B., & Putra, A. P. E. (2025). Digital literacy in scientific-based civics learning to strengthen students' civic disposition. *Jurnal Media Informatika, 6*(3), 1642–1649. https://doi.org/10.55338/jumin.v6i3.5804

Rahmelia, S., Apandie, C., & Nurizka, R. (2026). Penguatan civic disposition melalui praktik pedagogik partisipatif: Analisis literatur dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 14*(2), 186–196. https://doi.org/10.26740/kmkn.v14n2.p186-196

Ramadhan, R., & Sauri, R. S. (2026). Development of junior high school students civic disposition through innovative civic education learning strategies. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 196–208. https://doi.org/10.51468/jpi.v8i1.1386

Rumiati, S., Pudjiastuti, S. R., Karim, A. A., Darmawan, C., & Fitriasari, S. (2023). Model pengembangan digital citizenship pada pembelajaran PKn. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 8*(2), 126–135. https://journal-fis.um.ac.id/index.php/jippk/article/view/964

Sartika, R., & Megasari, I. I. (2025). Transformation of civics education through digital-interactive models: Strategies for strengthening students' civic responsibility. *Inovasi Kurikulum, 22*(4), 2617–2632. https://doi.org/10.64014/jik.v22i4.187

Schmitt, J. B., Baake, J., & Kero, S. (2024). What means civic education in a digitalized world? *Frontiers in Psychology, 15*, Article 1257247. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1257247

Sihotang, A. P., Barus, D. A. H., Sidabutar, E. D., Purba, F. L., Purba, N. Y., & Jamaludin, J. (2024). Peran guru PPKn profesional dalam literasi digital dalam

pembelajaran PPKn di SMAN Nasrani 2 Medan kelas X. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan, 1*(2), 246–254. https://doi.org/10.62383/hardik.v1i2.293

Sumiatun, S. P., Muslim, B., & Putri, A. M. (2026). Meningkatkan literasi digital dan ketahanan terhadap hoaks melalui pembelajaran PPKn: Analisis civic knowledge, skills dan disposition. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 14*(1), 126–135. https://doi.org/10.26740/kmkn.v14n1.p126-135

Supriyanto, A. (2026). Integrasi literasi digital dalam pembelajaran PPKn untuk pembentukan digital citizenship di era Society 5.0. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5*(2), 29–36. https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol5.Iss2.2616

Syamzaimar, S. (2026). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang baik di era digital. *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa, 8*(2), 14–25. https://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/jurnalmahasiswa/article/view/1666

Yuniarto, B., Khoerina, D. P., Ismiati, F., Putri, I. Y., & Rusthoufan. (2025). Peran media sosial dalam membentuk kesadaran konstitusi di kalangan mahasiswa: Studi kasus pada gerakan mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5*(2), 166–177. https://doi.org/10.36456/p.v5i2.10848